

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.
 - a. Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Selatan pada bulan Januari 2024 mengalami deflasi sebesar 0,08% (mtm). Inflasi tahunan sebesar 3,35% (yoy) dan deflasi tahun kalender (ytd) s.d. Januari 2024 sebesar 0,08%. Komoditi penyumbang utama deflasi bulan Januari 2024 secara *m-to-m* antara lain: Cabai Merah, Cabai Rawit, Angkatan Udara, Beras, Baju Muslim Wanita dan Bensin. Sedangkan komoditi penyumbang utama inflasi tahunan (y-on-y) bulan Januari 2024 didominasi komoditi makanan antara lain: non makanan: Emas Perhiasan dan Tarif Air Minum PAM.
 - b. Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Selatan pada bulan Februari 2024 mengalami inflasi sebesar 0,01% (mtm). Deflasi tahun kalender (ytd) s.d. Februari 2024 sebesar 0,07% dan Inflasi tahunan sebesar 3,15% (yoy). Inflasi Bulanan disebabkan oleh beberapa komoditas utama yaitu Cabai Merah, Daging Ayam Ras, Cabai Rawit, Telur Ayam Ras, dan Minyak Goreng. Sedangkan Inflasi Tahunan disebabkan oleh beberapa komoditas utama yaitu Beras, Cabai Merah, dan Daging Ayam Ras.
 - c. Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Selatan pada bulan Maret 2024 masih mengalami Inflasi sebesar 0,25%. Inflasi Tahun Kalender (kumulatif) sampai bulan Maret 2024 sebesar 0,18% dan Infasi tahunan sebesar 3,24% (yoy). Komoditi dominan yang menyebabkan terjadinya inflasi bulan Maret 2024 antara lain: Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Emas Perhiasan, Bawang Merah dan Bawang Putih. Komoditi yang dominan menyebabkan inflasi tahunan antara lain Beras, Daging Ayam Ras, Cabai Merah, Tarif Air Minum PDAM, dan Emas Perhiasan.
 - d. Beberapa komoditi pada triwulan I cenderung mengalami kenaikan pada beberapa komoditi yaitu Beras, Daging Ayam Ras, Cabai Merah, Cabai Rawit dan Emas. Kenaikan Harga beras pada triwulan I salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan HET Beras dari pemerintah pusat dengan terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional No 7 Tahun 2023 Tahun 30 Maret 2023 tentang Harga Ecaran Beras, dimana pada awalnya penetapan HET beras premium untuk pulau Jawa, Lampung, dan Sumsel Rp 12.800,-/kg kemudian mengalami perubahan menjadi 13.900,-/kg. Kemungkinan harga beras masih cenderung naik dikarenakan di pengaruhi juga oleh cuaca (pancaroba) yang ekstrim masih masuk musim hujan tetapi suhu ekstrim. Momen bulan ramadhan dan persiapan menjelang idul fitri menyebabkan harga sebagian besar bahan makanan pokok seperti telur dan daging ayam ras, serta bawang merah dan bawang putih merangkak naik karena tingginya permintaan di pasaran. Sementara, kenaikan harga emas disebabkan oleh melemahnya dollar AS sehingga banyaknya permintaan terhadap emas.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada triwulan ke I, pengaruh dari ketidakpastian global, akibat perang di beberapa Negara penyumbang energy dunia maupun Negara penghasil pangan pokok menyebabkan kenaikan beberapa komoditi, hal ini juga secara tidak langsung mempengaruhi harga komoditi pangan dan penting di dalam negeri. sebagai bahan baku minyak goreng juga sebagai salah satu bahan baku bahan bakar dan sampai Beberapa komoditi pangan yang cenderung mengalami kenaikan pada Triwulan I tahun 2024 antara lain; Beras, Daging Ayam Ras, Cabai Merah, Cabai Rawit dan Emas.

Kenaikan yang signifikan pada komoditi Beras dikarenakan kenaikan HET Beras dari

pemerintah pusat dengan terbitnya Peraturan Badan Pangan Nasional No 7 Tahun 2023 Tahun 30 Maret 2023 tentang Harga Eceran Beras, dimana pada awalnya penetapan HET beras premium untuk pulau Jawa, Lampung, dan Sumsel Rp 12.800,-/kg kemudian mengalami perubahan menjadi Rp.13.900,-/kg, serta adanya harga relaksasi yang dikeluarkan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional dan diikuti oleh harga komoditi pangan penting lainnya, terbatasnya pemenuhan beras impor yang didatangkan dari Thailand maupun Vietnam dikarenakan adanya upaya dari Negara pengekspor untuk membatasi keluarnya bahan pangan pokok dari negaranya dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Harga beras premium di Sumatera Selatan sebelum perubahan HET berkisar Rp. 10.800 - Rp. 11.000/kg sedangkan medium berkisar Rp.9.400/kg, setelah perubahan sampai dengan sekarang harga beras premium di pasar bisa mencapai Rp. 14.000 - Rp. 15.000/kg dan beras medium berkisar Rp. 12.500 - 13.000/kg.

Pelaksanaan penyaluran beras SPHP yang dijual sesuai dengan ketentuan adalah Rp.54.500/kg masih ditemukan di lapangan adanya upaya penjualan kembali dari konsumen sehingga beras tersebut harganya melebihi harga ketentuan hal ini perlu bagi Perum Bulog dibantu oleh Pemerintah setempat untuk dapat lebih menertibkan dan mensosialisasikan adanya beras SPHP sebagai beras medium impor yang dapat dijual di pasar dengan harga beli di tingkat konsumen akhir sesuai ketentuan Pemerintah dan tidak boleh dijual diatas ketentuan tersebut, serta pendistribusian beras sphp tersebut dapat merata dan dirasakan oleh kalangan masyarakat luas.

Kebutuhan telur dan daging ayam serta komoditi beberapa jenis cabean yang semakin meningkat dan juga menjelang lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah menyebabkan kenaikan harga. Telur ayam ras dari harga semula berkisar Rp. 23.000- 25.000/ kg, menjelang lebaran bisa mencapai Rp. 30.000/kg. untuk daging ayam di hari biasa berkisar Rp. 24.000/kg- Rp/ 26.000/kg, menjelang bulan Puasa/ramadhan dapat mencapai Rp. 30.000 - Rp. 40.000 / kg. Sedangkan untuk komoditi cabe, contoh cabe merah keriting biasanya diharga Rp 45.000 - Rp. 55.000/kg saat menjelang ramadhan dan hari raya bisa mencapai Rp. 75.000 - 90.000/kg. begitu juga halnya dengan jenis cabe rawit rentang harga mulai dari Rp. 90.000 - Rp. 110.000/kg.

Untuk mengantisipasi keresahan dan berkurangnya kemampuan daya beli di masyarakat yang berpenghasilan rendah, Pemerintah Pusat berupaya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk dapat segera ditidaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mengendalikan inflasi daerah agar kondisi di masyarakat tetap aman terhindar dari gejolak kenaikan harga dari beberapa bahan pangan pokok dan barang penting lainnya melalui pemanfaatan anggaran dengan perencanaan pemanfaatan anggaran lebih atau ditambah dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Pada triwulan pertama tahun 2024 kondisi tingkat inflasi Provinsi Sumatera Selatan masih berada pada target nasional Tahun 2024 yaitu $2,5 \pm 1\%$ (1,5% - 3,5%).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui TPID pada Tahun 2024 triwulan I telah memiliki rencana kegiatan di Tahun 2024 sesuai dengan Roadmap TPID Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan arahan Pj. Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat terhadap komoditi pangan penting, melalui inisiasi dari TPID Provinsi Sumatera Selatan untuk menggiatkan Operasi Pasar Murah yaitu (Gerakan Pengendalian

Inflasi Serentak Se-Sumatera Selatan), bekerjasama Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/kota bekerjasama dengan BUMD maupun BUMN.

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Sumatera Selatan dan akan dilakukan pada Triwulan I (pertama) tahun 2024 dalam upaya Pengendalian Inflasi Daerah melalui strategi 4K :

1. Upaya pemenuhan **Ketersediaan pasokan** melalui;
 - a. Optimalisasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to School and Go to Office, yang telah diluncurkan secara serentak oleh pj Gubernur Sumatera Selatan bersama Bupati/walikota Se-Sumatera Selatan, Forkopimda, BUMD/BUMN/Perbankan, instansi vertikal serta unsure sekolah (Ketua MKKS, Kepala Sekolah serta siswa SMA/SMK/MAN pada tanggal 25 februari 2024;
 - b. Pelaksanaan sidak pasar, sidak gudang, dan sidak distributor terhadap komoditi andil inflasi antara lain; Beras, cabe, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, gula pasir. Agar tidak menahan barang serta pengecekan stok barang dan harga bersama Satgas pangan Polda Sumsel, BI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan serta dinas/instansi terkait lainnya. Guna memastikan stok tersedia dan mencukupi sehingga mencegah panic buying di masyarakat;
2. Upaya **Keterjangkauan harga** melalui;
 - a. Monitoring/pemantauan harga dan stok oleh dinas/instansi terkait, seperti dinas perdagangan, dinas ketahanan Pangan dan peternakan serta Tim Satgas Pangan Polda (melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Panel Harga, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan aplikasi lainnya;
 - b. Operasi Pasar Murah (OPM) Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan beberapa BUMD Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Vertikal (Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, BPKP Provinsi Sumatera Selatan, DANDIM 0418 dan DENPOM II/Sriwijaya) dan Pemerintah kota Palembang, sebanyak 25 kali selama bulan Januari s.d. Maret 2024 setiap Hari Senin, Selasa dan Kamis, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah;
 - c. Launching Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumatera Selatan (GPISS) dan Operasi Pasar Murah Serentak Se Sumatera Selatan bersama dengan Operasi Pasar Murah di Kabupaten/kota oleh pj. Gubernur Sumatera Selatan hari Senin tanggal 29 Januari 2024;
 - d. Dinas Pertanian Prov. Sumsel menggelar Pasar Tani sebagai pasar penyeimbang secara rutin setiap rabu dan jumat dan Dinas Ketpang melalui Toko KEPO menyiapkan untuk komoditas pangan seperti daging beku, beras dan telur bekerja sama dengan distributor dan Gapoktan binaan;
 - e. kegiatan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) komoditas pangan, khususnya oleh Perum Bulog melalui beras SPHP;
3. Memastikan **Kelancaran distribusi** dengan;
 - a. TPID Provinsi Sumsel telah mengkoordinasikan jalur distribusi dan memprioritaskan pengangkutan bahan pangan dan bahan pokok penting, BBM, dan komoditas strategis lainnya.
 - b. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi "Market Place Sibejajo".
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana jalan, khususnya jalan menuju ke daerah centra produksi dan strategis.

Berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk penambahan flight penerbangan dari dan menuju Palembang dan beberapa bandara perintis.

4. Komunikasi yang efektif melalui;

- a. Menghadiri Rakor antara TPID dan TPIP (Kementerian Dalam Negeri) yang dilaksanakan setiap minggu pada hari Senin.
- b. Rapat Koordinasi TPID Provinsi Sumatera Selatan tanggal 9 Januari 2024 dalam rangka Penanganan Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Pj. Gubernur Sumatera Selatan, salah satu kesimpulan bahwa TPID Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat terhadap komoditi pangan pokok, akan melakukan kegiatan Operasi Pasar Murah bekerjasama dengan Pemerintah kab/kota, Instansi terkait, BUMD/BUMN dan Perbankan terpadu selama tiga bulan kedepan antisipasi menjelang bulan puasa/Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
- c. Pelaksanaan Rakor HLM TPID Se- Sumatera Selatan dalam rangka ketersediaan pasokan dan menjaga stabilitas harga menjelang HKBN Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah pada tanggal 20 Maret 2024.
- d. Pelaksanaan beberapa rapat Teknis TPID Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan upaya pengendalian inflasi Daerah.
- e. Publikasi mengenai berbagai kegiatan pengendalian inflasi misalnya operasi pasar beras murah, sidak pasar, dan Gertam cabai oleh berbagai TPID di wilayah Sumsel untuk menjaga ekspektasi positif masyarakat.
- f. Sinkronisasi dan Pemanfaatan Data Early Warning System (EWS) Neraca Produksi dan neraca kebutuhan pangan dengan Hasil Analisa BPS/BI tentang trend kenaikan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan (momen/waktu dan komoditi yang sering andil inflasi).

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pada Triwulan ke I, tingkat inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada Bulan Maret 2024 (yoy) masih berada pada target capaian Nasional yaitu 3,24% tapi di atas tingkat inflasi Nasional yang sebesar 3,05%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan 2 (dua) daerah kabupaten sebagai daerah IHK yang pada bulan Maret tingkat inflasi tahunannya berada di atas nilai target capaian nasional dengan rincian dari 4 Kab/kota IHK antara lain: Kota Palembang 2,90%, Kota Lubuk Linggau 2,36%, Kabupaten Ogan Komering Ilir 4,56%, dan Kabupaten Muara Enim 3,76%. Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir adalah daerah yang baru menjadi wilayah IHK selain Palembang dan Lubuklinggau, dan pada tahun 2024 perhitungan inflasi daerah tersebut telah menjadi perhitungan untuk Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Selatan.
2. TPID Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan pertama berdasarkan arahan Pj Gubernur Sumatera Selatan telah melaksanakan Operasi Pasar Murah bekerjasama dengan beberapa BUMD Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi Vertikal (Kejaksaaan Tinggi Sumatera Selatan, BPKP Provinsi Sumatera Selatan, DANDIM 0418 dan DENPOM II/Sriwijaya) serta Pemerintah kota Palembang secara massif selama dari bulan januari s.d. Maret 2024 sebanyak 25 kali dengan lebih memprioritaskan pemenuhan komoditi volitale foods yang sering andil inflasi antara lain beras, cabe merah, bawang merah dan bawang putih, telur, gula pasir dan minyak dengan harga jual yang lebih rendah dari harga pasar karena dijual dengan harga subsidi yang pembiayaannya berasal dari CSR BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan OPM ini dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga komoditi pangan yang sering andil inflasi hingga menjelang HBKN hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Hingga bulan April 2024 tingkat

inflasi Provinsi Sumatera Selatan secara bulanan maupun tahunan masih terkendali yaitu sebesar 3,12% (yoy) lebih sedikit diatas tingkat inflasi nasional yaitu 3% dan masih dalam target capaian tingkat inflasi nasional yaitu $3\% \pm 1\%$, sehingga perkembangan perekonomian Sumatera Selatan tetap bergerak kearah positif.

3. Pelaksanaan GSMP Go To School (GTS) dan Go To Office (GTO) merupakan upgrade dari Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Kegiatan GSMP GTS sedang digalakan di tahun 2024 oleh TPID Provinsi dengan mengikutkan peran serta aktif dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan target 140 SMA/AMK Se Sumatera Selatan, pelaksanaan dilakukan dengan semenarik mungkin agar sekolah dapat didukung oleh siswa-siswa aktif dalam gerakan menanam dan sekolah yang aktif dan berhasil dalam gerakan menanam tersebut akan dinilai dan mendapat awards. dengan gerakan menanam dan rencana Pelaksanaan Operasi Pasar/pasar murah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pangan tetap dilaksanakan sebagai bantalan pertahanan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan saat ini khususnya untuk menjaga stabilitas harga komoditi bahan pangan pokok dan BBM maupun BBM Subsidi, sejak adanya kenaikan BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat menyebabkan kenaikan beberapa komoditi pangan lainnya hal ini cukup memberatkan masyarakat yang sebelumnya kena imbas dari pandemic corona, kenaikan harga minyak goreng dan harga BBM akan sangat mempengaruhi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
4. Tahun 2024 Pemerintah Daerah telah berupaya menindaklanjuti arahan dari Pemerintah Pusat untuk memanfaatkan Dana Insentif Daerah. Dengan tujuan untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu yang kemungkinan akan kena dampak inflasi akibat dari kenaikan BBM dan komoditi bahan baku penting lainnya.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pj. Gubernur Sumatera Selatan menghimbau kepada TPID kabupaten/kota agar terus melanjutkan upaya pengendalian inflasi Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan Inflasi melalui kegiatan, antara lain;

1. Mengoptimalkan penggunaan anggaran baik yang bersumber dari pusat maupun daerah untuk upaya pengendalian inflasi.
2. Melakukan distribusi pangan pokok dari daerah surplus atau harga yang rendah ke daerah defisit.
3. Tidak menaikkan harga komoditas kelompok administered price, seperti tarif air minum, pajak dan lainnya.
4. Mendorong budidaya padi Sumatera Selatan agar dapat lebih optimal dalam produksi melalui penggunaan teknologi dan best practices.
5. Mendorong pengembangan budidaya dan KAD komoditas penyumbang inflasi, antara lain cabai dan bawang merah.
6. Optimalisasi neraca pangan sebagai input dalam pengambilan Keputusan dan perumusan upaya pengendalian inflasi.
7. Optimalisasi BTT untuk pengendalian inflasi.
8. Memaksimalkan hasil produksi pangan daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri terlebih dahulu.
9. Pimpinan daerah untuk melakukan himbauan belanja bijak dan stop boros pangan.